



CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia.

CSIS Commentaries DMRU-024-ID

31 March 2020

Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah COVID-19

Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE

wahyu@migrantcare.net

Yovi Arista

Divisi Data dan Informasi Migrant CARE

yovi@migrantcare.net

Zulyani Evi

Divisi Data dan Informasi Migrant CARE

evi@migrantcare.net

Dampak perkembangan virus korona dengan penyakit COVID-19 sebagai pandemi global telah meluas. Tidak hanya melingkupi isu kesehatan, tetapi ia juga memiliki implikasi yang serius pada masalah ketenagakerjaan. Pada 18 Maret 2020, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 151 Tahun 2020 yang menyatakan adanya Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kepmenaker ini

diterbitkan menyusul protes berbagai kalangan, terutama dari kalangan aktivis pekerja migran, ketika sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran yang hanya memberi perhatian pada pekerja formal dan sama sekali abai pada kerentanan pekerja migran dalam pandemi COVID-19.¹

Tidak hanya abai pada kerentanan pekerja migran, substansi yang ada dalam Surat Edaran yang dikeluarkan juga tidak mengakui keberadaan pekerja-pekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga, pekerja rumahan ataupun pekerja migran. Padahal demografi ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal, dan sebagian besar di antara mereka adalah perempuan. Hingga tahun 2019, sebanyak 57 persen komposisi tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal.² Sementara itu, terkait sektor migrasi tenaga kerja, angka pertumbuhan Pekerja Migran Indonesia sendiri berfluktuasi meningkat sebesar 1,1 persen setiap tahunnya.³

Karena tidak ada langkah sigap untuk mengantisipasi dampak yang terjadi pada pekerja di sektor informal, maka kelompok di sektor ini menjadi kelompok yang rentan tersentuh rantai tular COVID-19 karena tetap bersikeras untuk bekerja seperti biasa di saat muncul kebijakan untuk bekerja dari rumah. Langkah lain yang juga berisiko bagi pekerja informal adalah melakukan mudik lebih awal tanpa menunggu Lebaran, pulang ke kampung halaman.⁴

Dalam perspektif perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kebijakan penghentian sementara penempatan pekerja migran semata sangat tidak memadai untuk memutus rantai kerentanan pekerja migran dari pandemi COVID-19 serta dampak-dampaknya bagi kelangsungan pekerjaan. Keputusan Menteri ini hanya menetapkan penghentian proses penempatan pekerja migran Indonesia, terutama ke negara-negara yang mengalami wabah COVID-19 namun tidak mengelaborasi secara komprehensif langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan para pekerja migran Indonesia tidak tergerus hak-hak dasarnya.

Dalam dua artikel sebelumnya⁵, penulis menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia adalah sektor yang pertama kali mengalami langsung dampak penyebaran virus COVID-19 ketika masih berada di episentrum daratan Tiongkok dan sekitarnya. Sektor inilah yang juga sudah mengalami situasi *panic buying* di negara tujuan bekerja dan kekhawatiran akan kondisi kesehatannya ketika masker sebagai alat pelindung diri menjadi komoditas yang langka.

Pada awal tahun 2020, saat awal COVID-19 telah merebak di Tiongkok, Migrant CARE telah menyampaikan peringatan terhadap pemerintah Indonesia agar bergegas dan konsentrasi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia dan dampaknya pada pekerja migran Indonesia. Peringatan ini disampaikan dalam Migrant CARE Outlook 2020 yang diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2020, yang merupakan sebuah analisa berbasis data pantauan media serta laporan pekerja migran Indonesia yang berada di sekitar episentrum awal persebaran COVID-19.⁶

¹ Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

² Sakernas BPS, 2019

³ Migrant CARE Outlook 2020, dapat diakses di <http://www.migrantcare.net/2020/01/migrant-care-outlook-2020/>

⁴ Dalam pekan ini, berbagai liputan media massa juga mengkhawatirkan terjadinya mudik lebih awal yang bisa memicu ledakan kasus COVID-19 di daerah

⁵ Wahyu Susilo, "Stigma Karena Corona", artikel opini (pendapat) dalam Koran TEMPO, 7 Februari 2020 dan Wahyu Susilo "Bersama Melawan Korona, Bukan Menstigma" artikel opini dalam Media Indonesia, 6 Maret 2020.

⁶ Migrant CARE Outlook 2020

Pekerja Migran Indonesia sebagai Korban di Titik Awal Episentrum COVID-19

Gejala kerentanan warga negara Indonesia pada pusaran wabah COVID-19 sebenarnya telah terindikasi melalui tiga rentetan kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Kasus pertama yang menyedot perhatian publik adalah keberadaan ratusan warga negara Indonesia yang terisolir di Kota Wuhan, yang sebagian besar di antaranya merupakan mahasiswa. Kasus ini juga membuka kotak Pandora tentang keberadaan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di daratan Tiongkok. Para pekerja migran menyampaikan keluhan akan situasi yang dihadapinya terkait dengan rencana isolasi yang akan diterapkan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok saat itu. Namun demikian, ternyata Pemerintah Indonesia mengambil sikap yang diskriminatif dengan hanya mengevakuasi mereka yang “terdaftar secara resmi” sebagai pelajar dan mengesampingkan keluhan para pekerja migran Indonesia di daratan Tiongkok dengan alasan mereka bukan pekerja yang resmi.⁷

Kasus kedua adalah keberadaan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal pesiar Diamond Princess. Ini merupakan episentrum terbesar yang berada di moda transportasi kapal yang berisi 3711 penumpang dan ABK dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 69 ABK Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2020, terjadi penyebaran virus Korona dari salah satu penumpang yang akhirnya mengancam seluruh penumpang dan ABK. Dalam pemantauan global perkembangan virus Korona, episentrum Diamond Princess ini bahkan disejajarkan dengan negara.⁸ Kasus serupa juga terjadi di kapal pesiar Dream World, di mana terdapat 188 ABK Indonesia. Di kapal ini, diduga terdapat 8 penumpang yang positif tertular virus Korona.

Kasus yang ketiga adalah deklarasi perdana dari pemerintah Singapura mengenai wabah Korona yang terjadi di Singapura pada tanggal 4 Februari 2020. Salah satu pasien yang teridentifikasi merupakan Pekerja Rumah Tangga migran asal Indonesia yang bekerja di Singapura.⁹ Namun berbeda dengan kekisruhan perlindungan data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia, pemerintah Singapura mengedepankan prinsip dan protokol perlindungan data pribadi. Singapura juga memiliki pencatatan rantai tular yang rapi untuk menelusur jejak COVID-19 di Singapura. Hal ini bisa dimungkinkan karena posisi Singapura sebagai negara kota.

Rentetan kasus COVID-19 di atas telah memperlihatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai sektor atau bagian masyarakat yang paling rentan sejak titik awal persebaran COVID-19, mulai dari keterkaitan buruh migran tidak berdokumen di daratan Tiongkok, hingga mobilitas mereka yang dekat dengan episentrum dan relasi persebaran COVID-19 (kasus di Singapura, ABK di Kapal Diamond Princess dan Dream World).

Realitas tersebut sebenarnya sudah bisa menjadi titik pijak bahwa seharusnya sejak dini, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan seperangkat instrumen untuk mengantisipasi dampak peluasan COVID-19 terhadap pekerja migran Indonesia. Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan. Bahkan yang terjadi malah masih memosisikan hal tersebut terjadi di “luar Indonesia”. Kelengahan pemerintah Indonesia menganggap enteng persebaran COVID-19 di bulan Januari - Februari 2020 adalah bentuk sindrom NIMBY (*Not in My Backyard*), tidak melakukan sesuatu yang signifikan karena kejadian belum ada di depan mata. Ini adalah sikap yang fatal.

⁷ BBC Indonesia menuliskan tentang keluh kesah para pekerja migran Indonesia di daratan Tiongkok yang menghadapi kecemasan terpapar virus Corona. Baca laporannya Virus Corona: Puluhan Ribu Buruh Migran Indonesia Kerja di China, 'Juga Perlu Ditangani Pemerintah', BBC Indonesia 4 Februari 2020 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51367811>)

⁸ Dalam situs ini <https://www.worldometers.info/coronavirus/> perkembangan kasus Corona di kapal Diamond Princess disetarakan dengan negara.

⁹ Kasus pertama yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Singapura ini dicatat sebagai kasus ke 21. Dalam perkembangannya kasus ini dinyatakan sembuh. Lihat <https://www.gov.sg/article/covid-19-cases-in-singapore#week-3:-3-feb---9-feb>

Sementara itu, pekerja migran Indonesia mengalami kerentanan ganda dalam menghadapi perluasan wabah COVID-19. Kerentanan-kerentanan yang dihadapinya adalah (1) terpapar/tertular virus karena berada di wilayah seputar episentrum COVID-19, (2) distigma sebagai pembawa virus sehingga mengalami pembatasan mobilitas dan diskriminasi pelayanan dan (3) mengalami penambahan beban kerja sehingga sangat potensial untuk berkonflik dengan majikan.

Migrasi dan stigma pembawa penyakit memang bukan hal yang baru. Pada saat mewabah virus SARS satu dekade yang lalu, para pekerja migran juga menjadi sasaran stigma pembawa virus. Sebelumnya, para pekerja migran juga selalu dituduh sebagai pembawa virus HIV-AIDS. Bersandar dalam stigma ini, produksi kebijakan yang dibuat sering kali menjadi bias dan hanya fokus pada pembatasan ruang gerak, namun kemudian abai pada dampak-dampak lanjutan yang dihadapi oleh pekerja migran.

Dari berbagai laporan yang masuk ke Migrant CARE serta survei yang dilakukan oleh organisasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong, sudah ditemukan ada pembebanan kerja tambahan bagi para pekerja migran yang mobilitasnya terbatas karena kebijakan isolasi, pemaksaan kerja di hari libur dan tambahan bekerja dengan bahan kimia untuk pembersih. Di sisi yang lain, dengan beban tambahan pekerjaan mereka tidak mendapatkan tambahan gaji dan asupan vitamin yang memadai. Situasi ini bisa memicu konflik antara pekerja migran dan majikan yang bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Situasi kerja pekerja migran di masa pandemik COVID-19 ini memperlihatkan bahwa kerja pengasuhan dan kerja perawatan yang selama ini dilakukan pekerja migran perempuan adalah pekerjaan yang paling berisiko dan berada di garis depan berhadapan dengan paparan virus mematikan ini. Hal ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh UN Women.¹⁰

Realitas ini harus juga menyadarkan Pemerintah Indonesia akan kondisi pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor kesehatan. Data Penempatan Pekerja Migran Di sektor kesehatan yang dikompilasi dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)¹¹ menunjukkan dalam rentang waktu 2017-2019 setidaknya terdapat 150.907 perawat, 198 bidan dan 20 asisten bidan. Mereka bekerja di berbagai negara tujuan yang sekarang ini juga menjadi wilayah pandemi COVID-19. Sebagai catatan, program kerja sama pekerja sektor kesehatan G to G (*Government to Government*) yang dilakukan pemerintah menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman dan Jepang.

Pada tanggal 18 Maret 2020, secara resmi Pemerintah Malaysia mulai menerapkan *lockdown* total. Langkah ini tentu memiliki pengaruh pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Seperti di Hong Kong, *lockdown* di Malaysia juga membuat para pekerja migran Indonesia di sektor domestik bertambah beban pekerjaan tanpa ada tambahan upah. Sementara itu, bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang bekerja sebagai kuli bangunan, pekerja pabrik, restoran hingga *cleaning service* dengan upah harian atau mingguan, *lockdown* mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka karena pembatasan moda transportasi dan penutupan tempat kerja.¹²

Langkah *lockdown* pemerintah Malaysia yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Order) yang semula ditetapkan hingga 31 Maret 2020, diperpanjang lagi hingga tanggal 14 April 2020. Langkah ini membawa pengaruh pada Layanan konsuleran dan keimigrasian yang selama ini dilakukan oleh seluruh Perwakilan RI di Malaysia.

¹⁰ UN Women, "The COVID-19 Outbreak and Gender: Key Advocacy Point from Asia and The Pacific"

<https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/the-covid-19-outbreak-and-gender> diakses 27 Maret 2020.

¹¹ Data diolah dari statistik penempatan pekerja migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹² Baca Kompas.com "P3WNI: Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Tak Takut Covid-19, tetapi Takut Kelaparan",

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/16251661/p3wni-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-tak-takut-covid-19-tetapi-takut>

Situasi ini membawa para pekerja migran Indonesia yang seharusnya memperbaharui dokumennya dalam situasi ketidakpastian. Himbauan yang dikeluarkan Perwakilan RI di luar negeri melalui Surat Edaran secara berkala tidak memberikan solusi konkret atau opsi alternatif akan kelangkaan logistik pangan pakeklik dan ancaman kehilangan pekerjaan yang dihadapi pekerja Migran Indonesia. Pelayanan yang dibuka sangat terbatas melalui sambungan telepon.¹³

Di saat yang sama, walau mendeklarasikan kondisi *lockdown*, dalam pekan ini telah dilakukan deportasi terhadap ribuan pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia. Ini makin membuat pekerja migran Indonesia rentan terpapar COVID-19 dan makin membuat perbatasan di kedua negara ini bisa menjadi media rantai-tular COVID-19.

Di Arab Saudi, sudah tiga kota yang dinyatakan *lockdown* yakni Mekkah, Madinah, dan Riyadh. Kebijakan *lockdown* di negara-negara tujuan Pekerja Migran Indonesia akan menambah kerentanan pekerja migran perempuan di sektor domestik akan Kekerasan Berbasis Gender. Di Arab Saudi juga masih banyak pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen yang terjebak dalam kondisi rentan dan bisa menghadapi ancaman deportasi.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19 ini sama sekali tidak tergambar dalam *update* yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Situasi kerentanan pekerja migran tidak terlihat dalam *update* yang hanya menggambarkan dari sisi kuantitas saja.¹⁴

Rekomendasi

Memahami lebih dalam mengenai kompleksitas permasalahan pekerja migran Indonesia dalam krisis wabah COVID-19 memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan reaktif dan tidak berbasis pada pengalaman kerentanan pekerja migran Indonesia tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan konkret pekerja migran Indonesia.

Secara spesifik, Migrant CARE mendesak:

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI harus membuat kebijakan penanganan wabah COVID-19 yang inklusif dan sensitif gender dan tempat mengedepankan dimensi pemenuhan hak-hak pekerja dan hak asasi manusia.
2. Kementerian Luar Negeri RI harus memberikan layanan paripurna pada pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan informasi dan bantuan *emergency* untuk wilayah-wilayah yang mengalami *lockdown*.
3. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memperbarui situasi dan kondisi para pekerja migran Indonesia sektor kesehatan yang selama ini tidak terinformasikan apa yang dihadapinya dalam krisis wabah COVID-19.

¹³ Lihat Surat Edaran KBRI Kuala Lumpur per 16 Maret 2020 <http://kbrikualalumpur.org/w/2020/03/16/perkembangan-covid-19-hingga-16-maret-2020-di-malaysia-dan-tindakan-pencegahannya/>

¹⁴ Melalui pantauan Kementerian Luar Negeri per 25 Maret 2020 terdapat setidaknya 79 confirmed cases COVID-19 WNI di luar negeri. Dengan kasus tertinggi berada di Singapura, Malaysia, India, disusul Jepang dan Arab Saudi.

Migrant CARE juga mendorong:

1. Kebijakan Perlindungan Sosial untuk menangani krisis Wabah COVID-19 tidak boleh melupakan realitas kerentanan pekerja migran Indonesia di negara tujuan bekerja dan komunitas pekerja migran di wilayah asalnya

Langkah-langkah penanganan dan sosialisasi pencegahan penyebaran wabah COVID-19 harus melibatkan aktif organisasi pekerja migran di negara tujuan, komunitas pekerja migran di daerah asal serta inisiatif-inisiatif perlindungan pekerja migran berbasis desa (Desbumi, Desmigratif dan KKBM), serta memaksimalkan platform-platform media sosial dan saluran-saluran informasi yang selama ini diakses pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160

Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (62-21) 384 7517 | csis.or.id

COVID-19 Commentaries Editors

Philips J. Vermonte, Shafiah Muhibat, Vidhyandika Perkasa, Yose Rizal Damuri, Beltsazar Krisetya